



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi penyelenggaraan pendidikan pada sekolah rakyat, perlu penataan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sekolah rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1637);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH RAKYAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Rakyat adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbasis asrama dengan mengedepankan pembentukan karakter dan kecakapan hidup dengan biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah.
 2. Kepala Sekolah Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola Sekolah Rakyat.
 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 5. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi kesejahteraan sosial serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekolah Rakyat Dasar;
 - b. Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
 - c. Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
 - d. Sekolah Rakyat Terintegrasi.
 - (2) Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Sekolah Rakyat rintisan.
3. Sebelum Bagian Kesatu Bab III ditambahkan 1 (satu) bagian yaitu Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Sekolah Rakyat Dasar

4. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, dan Pasal 3D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Sekolah Rakyat Dasar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar kelas I sampai dengan kelas VI bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

Pasal 3B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A, Sekolah Rakyat Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran umum serta pendidikan karakter berbasis asrama;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling serta pengembangan ekstrakurikuler;
- d. pengelolaan sarana, prasarana, serta unit penunjang pengajaran;
- e. pelaksanaan administrasi akademik dan kesiswaan;
- f. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi pendidikan;
- g. pelaksanaan kerja sama;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 3C

Susunan organisasi Sekolah Rakyat Dasar terdiri atas:

- a. Kepala Sekolah; dan
- b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 3D

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C huruf a melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.

5. Bagian Kesatu Bab III diubah menjadi Bagian Kedua Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Sekolah Rakyat Menengah Pertama

6. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Sekolah Rakyat Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar kelas VII sampai dengan kelas IX bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

7. Bagian Kedua Bab III diubah menjadi Bagian Ketiga Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Sekolah Rakyat Menengah Atas

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Sekolah Rakyat Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan menengah kelas X sampai dengan kelas XII bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

9. Bagian Ketiga Bab III diubah menjadi Bagian Keempat Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Sekolah Rakyat Terintegrasi

10. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Sekolah Rakyat Terintegrasi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan/atau menengah secara terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin.

11. Bagian Keempat Bab III diubah menjadi Bagian Kelima Bab III sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Unit Penunjang Sekolah Rakyat

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Bagan susunan organisasi Sekolah Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3C, Pasal 6, Pasal 12, dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

13. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Sekolah ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusat.

14. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Jumlah Sekolah Rakyat di lingkungan Kementerian terdiri atas:

- a. 8 (delapan) Sekolah Rakyat Dasar;
 - b. 34 (tiga puluh empat) Sekolah Rakyat Menengah Pertama;
 - c. 46 (empat puluh enam) Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan
 - d. 78 (tujuh puluh delapan) Sekolah Rakyat Terintegrasi.
- (2) Nomenklatur dan lokasi masing-masing Sekolah Rakyat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
15. Ketentuan Lampiran I Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
16. Ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd

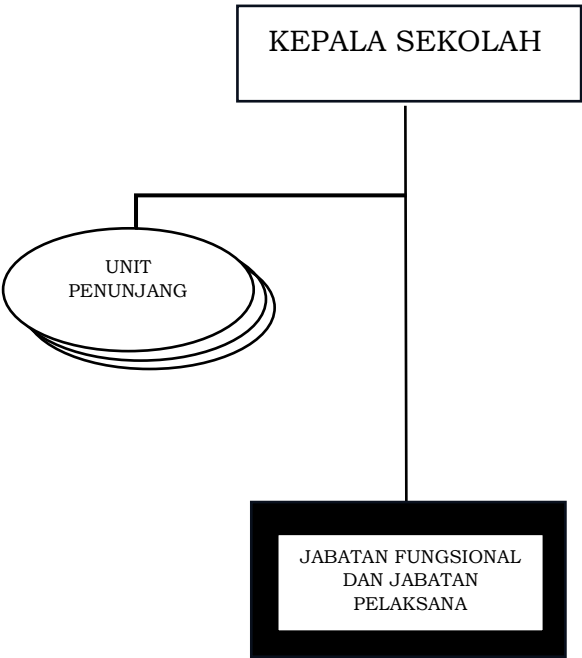
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 946

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKOLAH RAKYAT

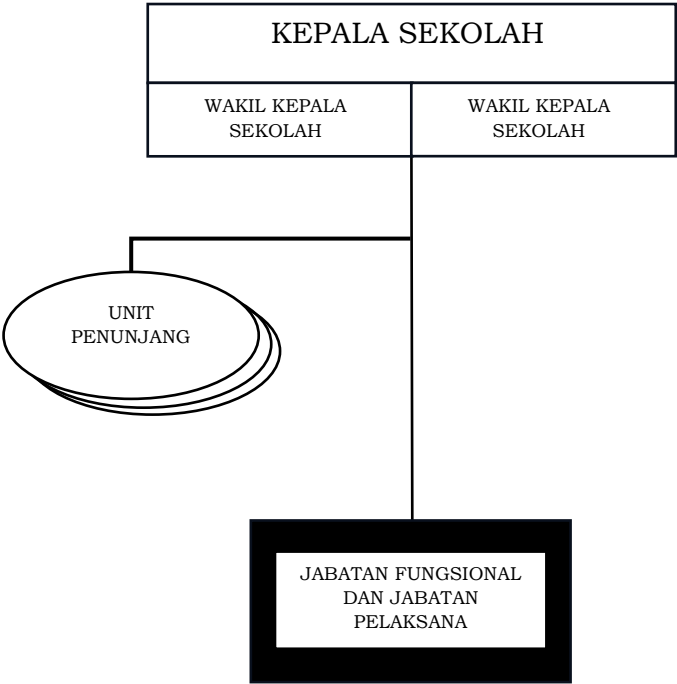
- A. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Dasar
1. Sekolah Rakyat Dasar



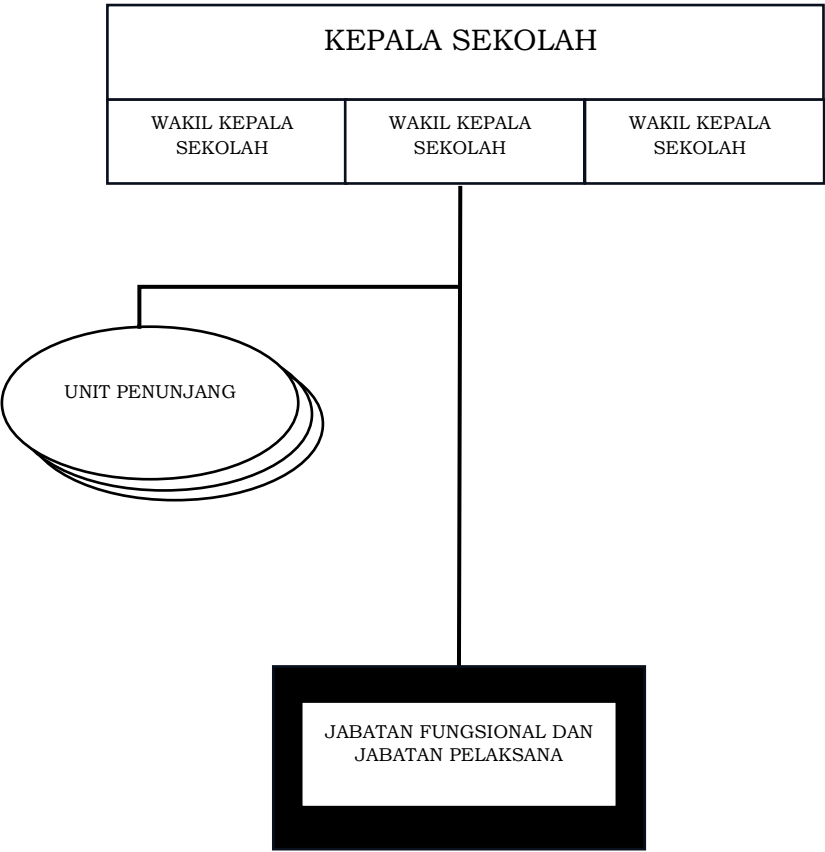
- B. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Menengah Pertama
1. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah



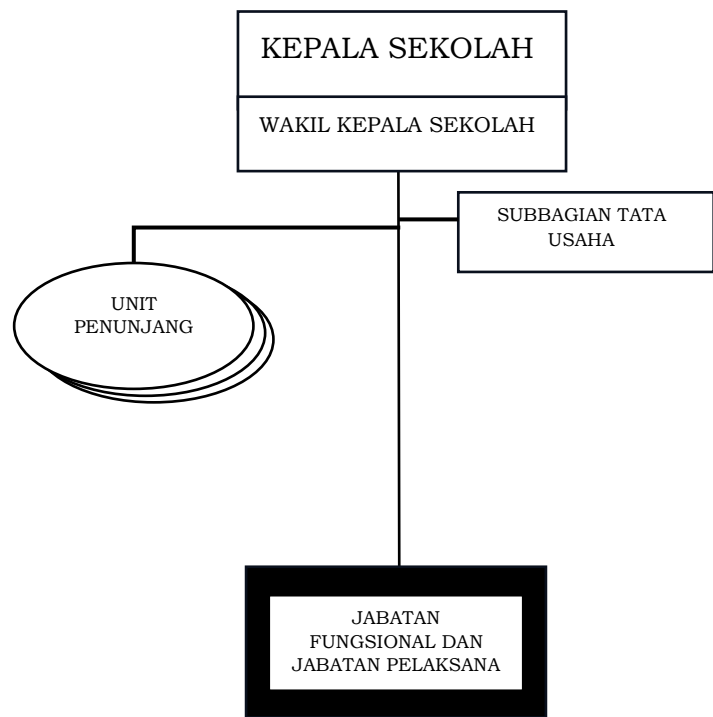
2. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 2 (dua) wakil Kepala Sekolah



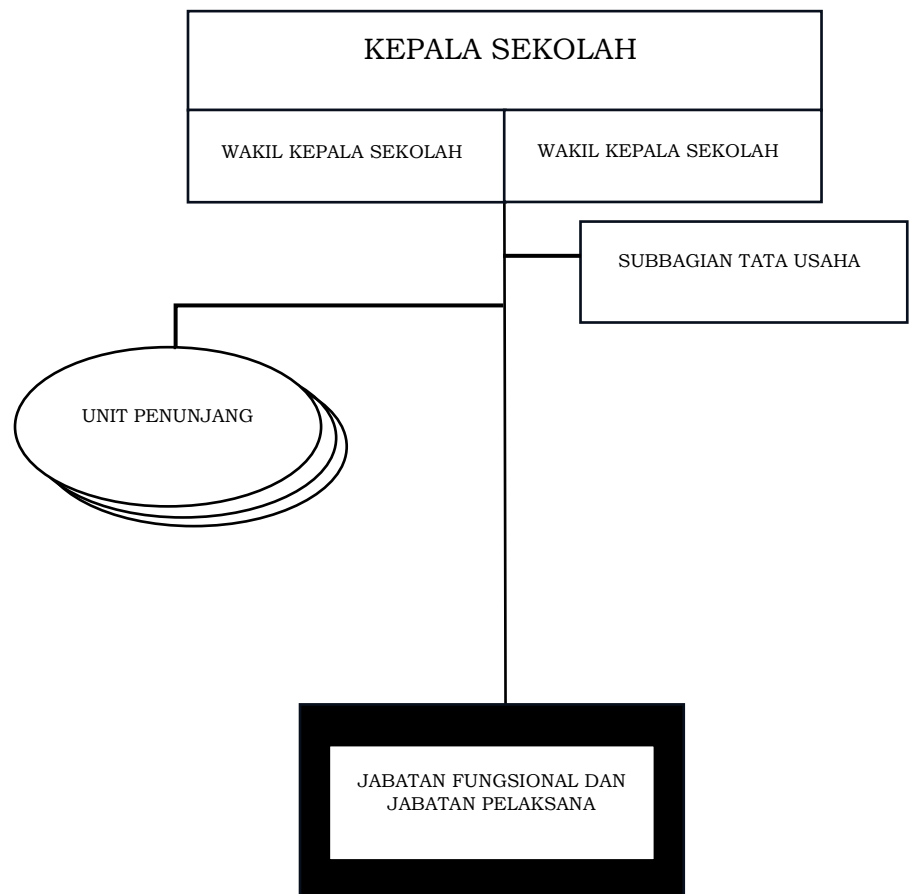
3. Sekolah Rakyat Menengah Pertama dengan 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah



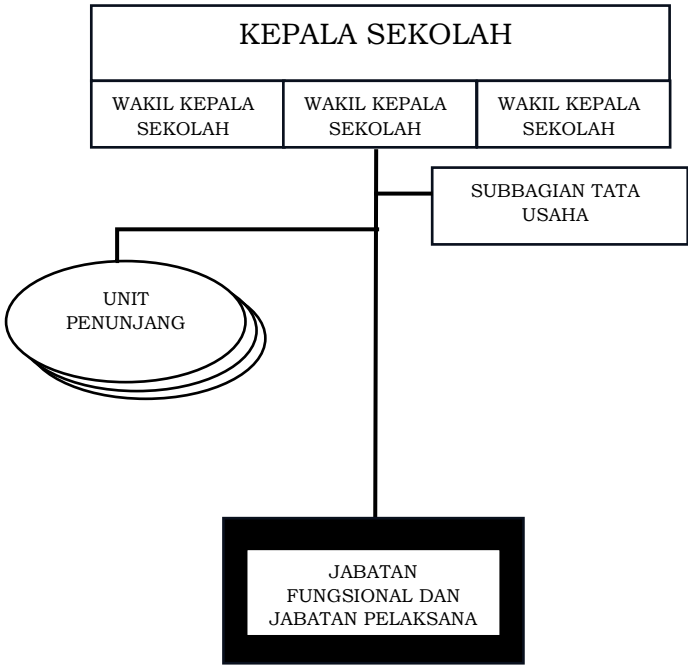
- C. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Menengah Atas
1. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah



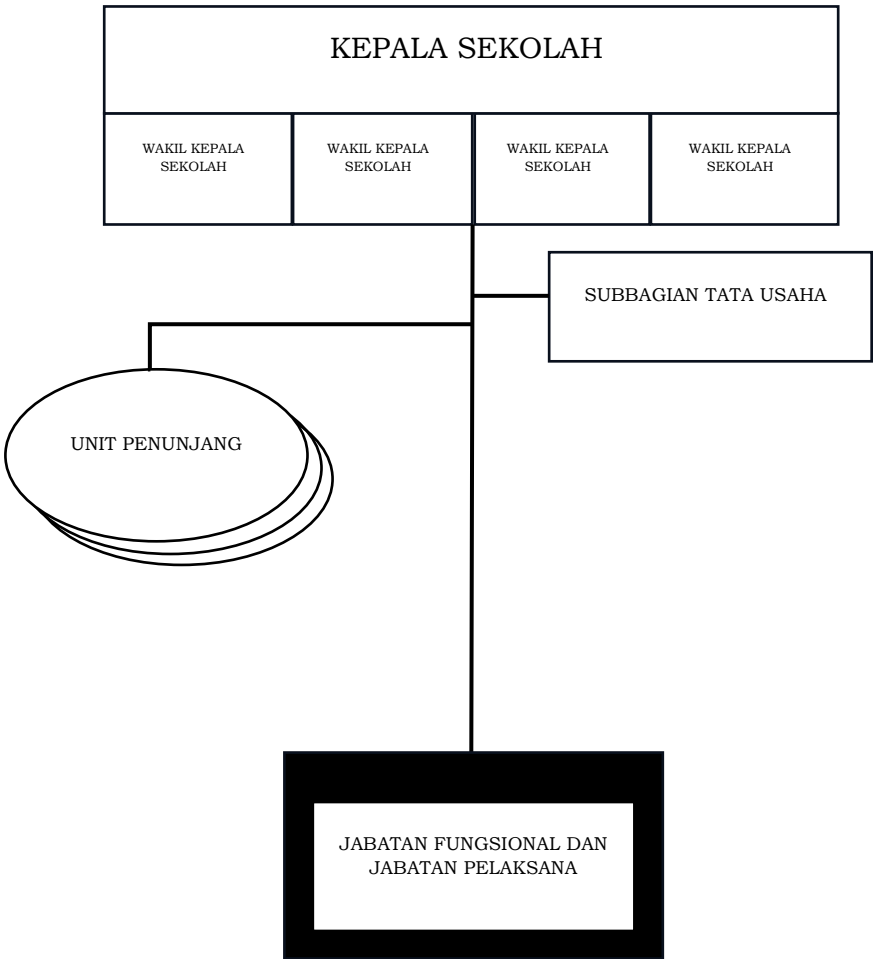
2. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 2 (dua) wakil Kepala Sekolah



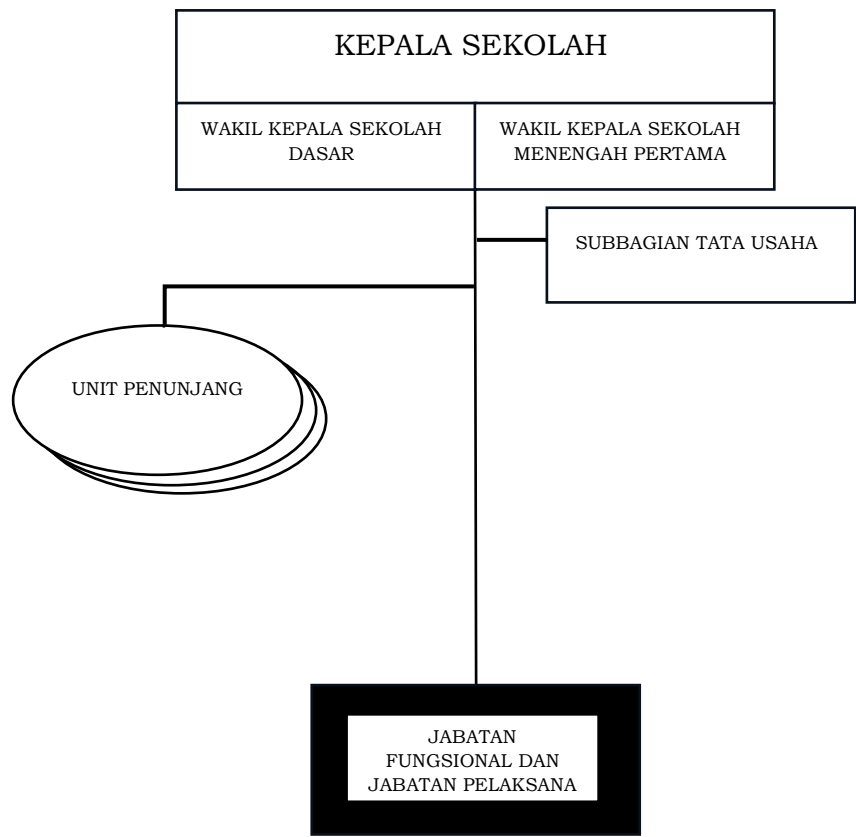
3. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 3 (tiga) wakil Kepala Sekolah



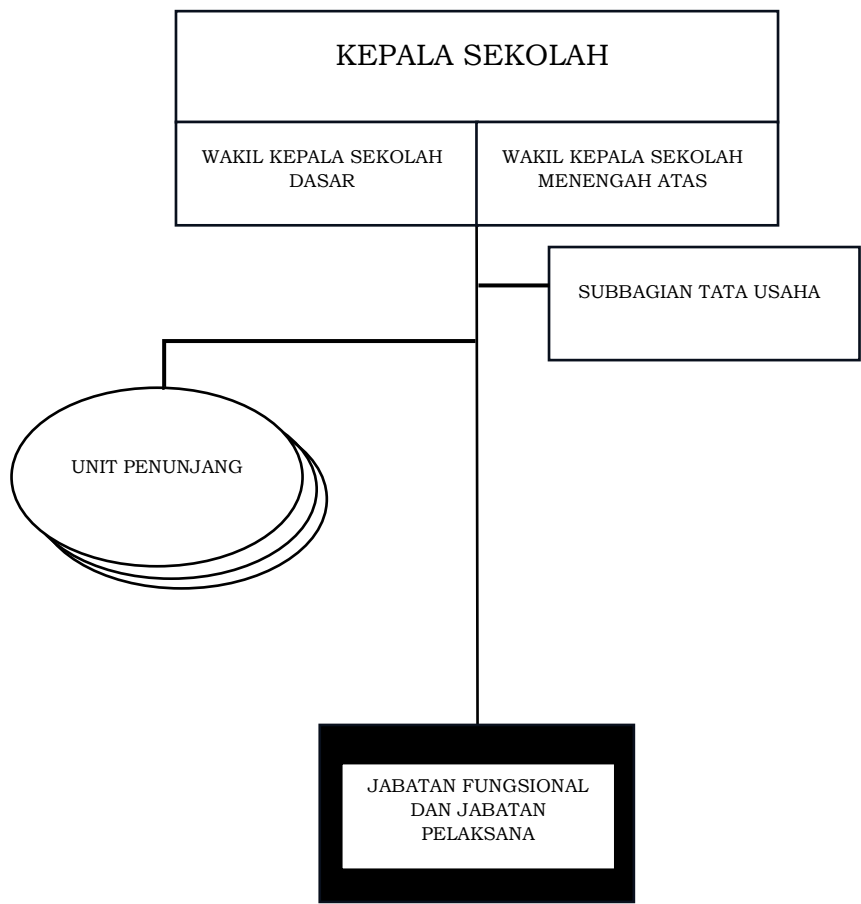
4. Sekolah Rakyat Menengah Atas dengan 4 (empat) wakil Kepala Sekolah



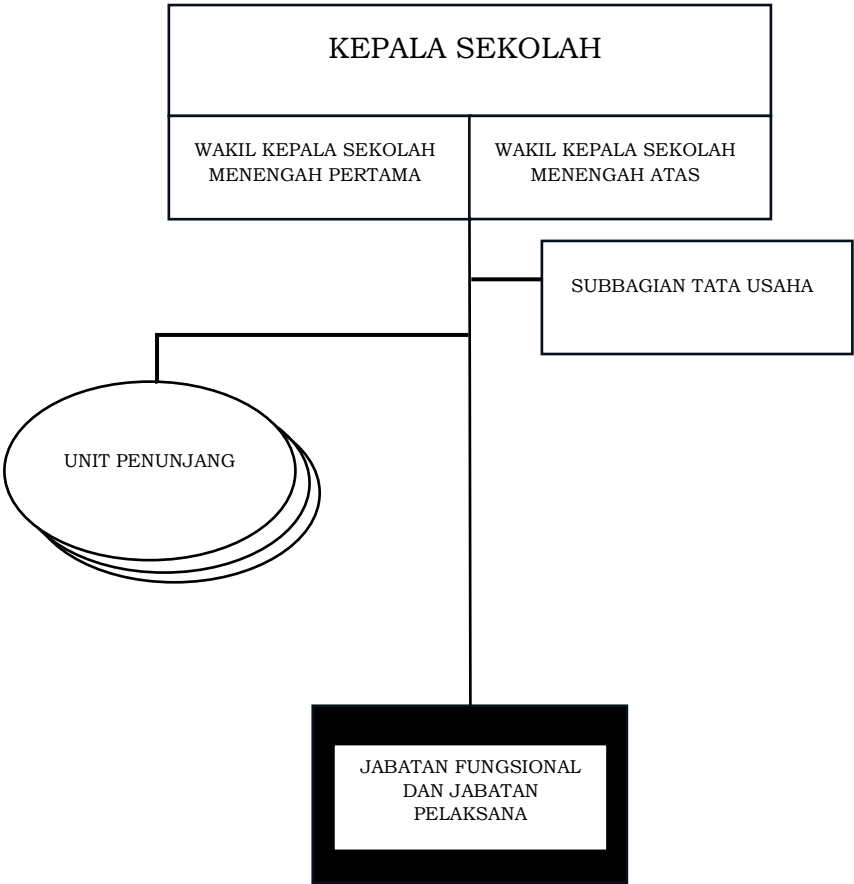
- D. Bagan Susunan Organisasi Sekolah Rakyat Terintegrasi
1. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama



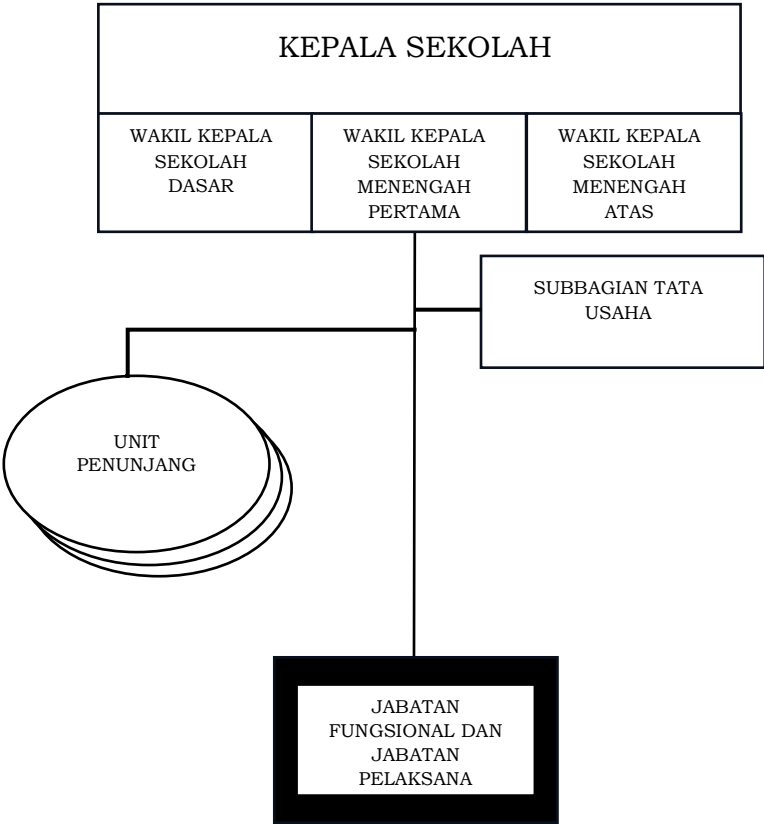
2. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



3. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama dan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



4. Sekolah Rakyat Terintegrasi dengan 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Dasar, 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Pertama, 1 (satu) wakil Kepala Sekolah Menengah Atas



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

SAIFULLAH YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI SOSIAL NOMOR 7
TAHUN 2025 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKOLAH RAKYAT

NOMENKLATUR DAN LOKASI SEKOLAH RAKYAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. Sekolah Rakyat Dasar

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara	Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
2	Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
3	Sekolah Rakyat Dasar 3 Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
5	Sekolah Rakyat Dasar 5 Sumbawa	Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya	Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
7	Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
8	Sekolah Rakyat Dasar 8 Ternate	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara

B. Sekolah Rakyat Menengah Pertama

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 Deli Serdang	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
2	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
3	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
4	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
5	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 5 Solok	Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
6	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur	Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
7	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 7 Sukabumi	Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat
8	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Cimahi	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
9	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
10	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
11	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 11 Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
12	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 12 Pati	Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
13	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas	Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
14	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Batu	Kota Batu, Provinsi Jawa Timur
15	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 Mojokerto	Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
16	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Malang	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
17	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan	Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
18	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 18 Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat
19	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang	Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
20	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
21	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado	Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
22	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi	Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah
23	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 23 Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
24	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 24 Gowa	Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan
25	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
26	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate	Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara
27	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 27 Banjarnegara	Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah
28	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 28 Pasuruan	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
29	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 29 Pamekasan	Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur
30	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 30 Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
31	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 Takalar	Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
32	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 32 Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara
33	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 33 Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh
34	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka	Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat

C. Sekolah Rakyat Menengah Atas

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
2	Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar	Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
3	Sekolah Rakyat Menengah Atas 3 Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara
4	Sekolah Rakyat Menengah Atas 4 Padang	Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
5	Sekolah Rakyat Menengah Atas 5 Jambi	Kota Jambi, Provinsi Jambi
6	Sekolah Rakyat Menengah Atas 6 Bengkulu	Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
7	Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
8	Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir	Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
9	Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur	Kota Administratif Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
10	Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan	Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta
11	Sekolah Rakyat Menengah Atas 11 Bandung	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
12	Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
13	Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
14	Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 Bandung Barat	Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat
15	Sekolah Rakyat Menengah Atas 15 Magelang	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
16	Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung	Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
17	Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta	Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah
18	Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora	Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah
19	Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul	Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
20	Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Sleman	Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
21	Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya	Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
22	Sekolah Rakyat Menengah Atas 22 Malang	Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
23	Sekolah Rakyat Menengah Atas 23 Pacitan	Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur
24	Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kediri	Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur
25	Sekolah Rakyat Menengah Atas 25 Lamongan	Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
26	Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
27	Sekolah Rakyat Menengah Atas 27 Takalar	Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan
28	Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara
29	Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura	Kota Jayapura, Provinsi Papua
30	Sekolah Rakyat Menengah Atas 30 Padang Sidempuan	Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara
31	Sekolah Rakyat Menengah Atas 31 Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
32	Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan	Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
33	Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan	Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
34	Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 Lebak	Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
35	Sekolah Rakyat Menengah Atas 35 Wonosobo	Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
36	Sekolah Rakyat Menengah Atas 36 Bojonegoro	Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur
37	Sekolah Rakyat Menengah Atas 37 Gresik	Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
38	Sekolah Rakyat Menengah Atas 38 Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
39	Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar	Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
40	Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon	Kota Ambon, Provinsi Maluku
41	Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor	Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua
42	Sekolah Rakyat Menengah Atas 42 Sarmi	Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua
43	Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang	Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
44	Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa	Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara
45	Sekolah Rakyat Menengah Atas 45 Ogan Komering Ulu	Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
46	Sekolah Rakyat Menengah Atas 46 Pacitan	Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur

D. Sekolah Rakyat Terintegrasi

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
1	Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon	Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
2	Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
3	Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan	Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
4	Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang	Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat
5	Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo	Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
6	Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember	Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
7	Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo	Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
8	Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang	Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
9	Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
10	Sekolah Rakyat Terintegrasi 10 Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
11	Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir	Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau
12	Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 Kepulauan Anambas	Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau
13	Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur	Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi
14	Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur	Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
15	Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 Empat Lawang	Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan
16	Sekolah Rakyat Terintegrasi 16 Bandung	Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat
17	Sekolah Rakyat Terintegrasi 17 Cimahi	Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat
18	Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban	Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
19	Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo	Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan
20	Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu	Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
21	Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
22	Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat
23	Sekolah Rakyat Terintegrasi 23 Katingan	Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
24	Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
25	Sekolah Rakyat Terintegrasi 25 Bireuen	Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
26	Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidie Jaya	Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh
27	Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh
28	Sekolah Rakyat Terintegrasi 28 Subulussalam	Kota Subulussalam, Provinsi Aceh
29	Sekolah Rakyat Terintegrasi 29 Tapanuli Selatan	Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara
30	Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan	Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
31	Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang	Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
32	Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna	Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau
33	Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau
34	Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur	Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
35	Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
36	Sekolah Rakyat Terintegrasi 36 Lebak	Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
37	Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang	Kota Serang, Provinsi Banten
38	Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan	Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat
39	Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Garut	Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat
40	Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu	Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat
41	Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
42	Sekolah Rakyat Terintegrasi 42 Bandung	Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
43	Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Bekasi	Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat
44	Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen	Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah
45	Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
46	Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
47	Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang	Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur
48	Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Pasuruan	Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
49	Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 Sumenep	Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur
50	Sekolah Rakyat Terintegrasi 50 Trenggalek	Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur
51	Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan	Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
52	Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang	Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat
53	Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak	Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
54	Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Gunung Mas	Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
55	Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotawaringin Timur	Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
56	Sekolah Rakyat Terintegrasi 56 Banjarbaru	Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
57	Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur

NO	NOMENKLATUR	LOKASI
58	Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda	Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
59	Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan	Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara
60	Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una	Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah
61	Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone	Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
62	Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja	Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan
63	Sekolah Rakyat Terintegrasi 63 Sinjai	Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan
64	Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng	Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan
65	Sekolah Rakyat Terintegrasi 65 Barru	Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan
66	Sekolah Rakyat Terintegrasi 66 Sidenreng Rappang	Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan
67	Sekolah Rakyat Terintegrasi 67 Pangkajene Kepulauan	Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
68	Sekolah Rakyat Terintegrasi 68 Luwu Utara	Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan
69	Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 Buton Tengah	Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara
70	Sekolah Rakyat Terintegrasi 70 Kendari	Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
71	Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Boalemo	Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo
72	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju	Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat
73	Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah	Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku
74	Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual	Kota Tual, Provinsi Maluku
75	Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura	Kota Jayapura, Provinsi Papua
76	Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika	Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah
77	Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke	Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
78	Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen	Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum


Rizi Umi Utami
197801282006042003